

DIPLOMASI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM KONTEKS PERGESERAN GEOPOLITIK DI KAWASAN PADA MASA DEPAN

INDONESIAN NAVAL DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF FUTURE REGIONAL GEOPOLITICAL DOWNSHIFT

A. Yani Antariksa¹

Lemhannas
(antariksayani10@gmail.com)

Abstract – Dunia telah mengalami pergeseran Geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Cina Timur (LCT), serta Samudera Hindia. Dua kawasan ini menjadi perhatian dunia secara politik, ekonomi dan keamanan, serta menjadi perhatian geopolitik minyak. Khusus untuk Samudera Hindia, ketegangannya belum seperti di LCS/LCT. Di kawasan ini, Indonesia lebih menghadapi gangguan penyelundupan manusia dan tindakan kapal perang Australia yang melanggar wilayah. Hal ini diatasi dengan diplomasi secara lunak melalui protes diplomasi. Perkembangan diplomasi pertahanan termasuk diplomasi AL, sekarang dan ke depan semakin kompleks dalam kondisi damai dan perang. Dilaksanakan melalui Inisiatif pengaturan keamanan ASEAN melalui berbagai mekanisme diplomatik seperti ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, Shangrila Dialogue ASEAN + 1, dan ASEAN + 3. Di tingkat regional ditopang pilar-pilar TAC, Zopfan, Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara, serta ASEAN Security Community serta beberapa dialog tingkat tinggi menteri pertahanan, panglima angkatan bersenjata, kelapa staf angkatan, asop dan asintel. Pembahasan dalam dialog ini masih tertuju pada isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, bencana alam, penyakit menular, keamanan pangan dan energi, perubahan iklim, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal dan pembajakan. Kesemuanya akan bermakna bila disertai dengan Angkatan bersenjata yang kuat/sepadan.

Kata kunci : diplomasi angkatan laut, pertahanan, geopolitik, kawasan

Abstract - The world has experienced a shift geopolitics in the South China Sea (SCS) and the East China Sea (ECS), and the Indian Ocean. Two regions attract the attention of the world of politics, economics and security, as well as geopolitical oil concern, especially for the Indian ocean tension. Not like in the SCS/ ECS, Indonesia are facing people smuggling disruption and Australian warships actions that violate the territory. This is resolved by diplomacy in software through diplomatic protests. Defense diplomacy developments including Naval Diplomacy, now and in the future are more complex in conditions of peace and war. Initiatives implemented through the ASEAN security arrangements made through a variety of mechanisms such as the ASEAN Ministerial Meeting diplomatic, ASEAN Regional Forum, ASEAN + 1 Dialogue Shangrila, and ASEAN + 3 . At the regional level supported pillars TAC, Zopfan , Southeast Asia Nuclear Free Zone, as well as the ASEAN Security Community and some high-level dialogue defense minister, army, navy and air force chief, operation

¹ Penulis Laksma TNI Dr. A.Yani Antariksa., SE, SH, MM. Sehari hari bertugas sebagai dosen Manajemen Strategi di Lemhannas dan Pasca Sarjana UI Ketahanan Nasional, bidang Lingstra dan Manajemen Strategi, Geopolitik dan Geostrategi. Lulus AAL 1982, dengan predikat Adimakayasa dan Lulus Doktor di Bidang Ekonomi pada bulan September 2003, di UNTAG Surabaya.

and intelligent staff. The discussion in this dialogue is focused on issues of non-traditional security such as terrorism, natural disasters, infectious diseases, food and energy security, climate change, human trafficking, illegal arms trafficking and piracy. All of them will be meaningful when accompanied by a credible armed force.

Keywords : Naval Diplomacy, defense, geopolitic, regional

Pendahuluan

Dunia telah mengalami pergeseran Geopolitik dari kawasan Eropa ke Asia Pasifik (*Aspas*), utamanya di Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Cina Timur (LCT). Masing masing negara mengambil inisiatif geopolitik dan geostrategis di *Aspas*, LCS dan LCT, yang menjadi penting secara politik, ekonomi, keamanan. AS mengantisipasi geopolitik ini dengan *reballancing* (kehadiran kembali) di Asia Pasifik dan menaruh perhatian di LCT dan LCS, menolak Adiz Cina di LCT, menolak kekerasan di LCS, *Freedom of Navigation* dan akan bertindak apabila ada negara yang memaksakan kehendak di LCS. Dengan pemerintahan baru Obama, menggenarkan kebijakan *US pivot to Asia*, memberikan sinyal bahwa Asia merupakan kawasan penting bagi Amerika dan terdapat kepentingan nasionalnya di kawasan ini. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad ke-21. Dalam perubahan geopolitik pertama ini, Indonesia mengambil sikap netral, tetap mengandalkan politik bebas aktif yang berlandaskan geopolitik Wawasan Nusantara, dan menjadi mediator negara negara anggota ASEAN yang berkonflik dengan Cina dengan deklarasi *Code of Conduct* (COC) dan SOP untuk *Declaration of The Code of Conduct* (DOC).

Geopolitik kedua yang harus dihadapi Indonesia adalah di Samudera Hindia (Laut Indonesia), yakni semakin banyaknya kekuatan yang hadir di samudera Indonesia seperti Amerika Serikat, Prancis, India, Australia dan Cina memberikan sinyal bahwa kawasan samudera Hindia akan menjadi kawasan geopolitik kedua setelah Laut Cina Selatan. Implikasi langsung terhadap Indonesia adalah adanya beberapa kasus, seperti penyadapan Australia terhadap warga negara Indonesia, pengusiran AL Australia terhadap pencari suaka ke perairan Indonesia, dan pelanggaran Kapal Perang AL Australia² terhadap wilayah perairan Indonesia di Selatan Jawa sampai dengan 8 NM, merupakan catatan penting dari kemerosotan hubungan bilateral kedua negara. Kejutan

² Ludiro Madu, "Diplomasi Pertahanan RI", *Suara Merdeka*, 6 Maret 2014.

terakhir berasal dari laporan resmi militer Australia pada 19 Februari 2014. Laporan itu mempertegas bahwa AL Australia telah enam kali melanggar wilayah perairan Indonesia. Pelanggaran kedaulatan maritim Indonesia itu berlangsung sejak Desember 2013 hingga Januari 2014 melalui operasi keamanan perbatasan. Australia telah mengancam kedaulatan Indonesia. Ancaman tersebut salah satunya ditandai dengan terdamparnya puluhan imigran gelap di pantai Barat Pangandaran dengan menumpang sekoci. Sekoci itu disebut merupakan pemberian tentara Australia secara cuma-cuma. Kalau fakta itu benar berarti tindakan Australia melanggar kedaulatan Indonesia.³

Salah satu penyebab ketegangan bilateral ini adalah kebijakan *boat turn-back* pemerintahan PM Tony Abbot terhadap kapal/perahu pencari suaka. Dari aspek geopolitik Australia ini, mereka melakukan geostrategi dengan kegiatan Operasi Kedaulatan Perbatasan (*Sovereign Border Operation*) yang mendorong AL Australia tanpa izin memasuki wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena pertama, Patroli TNI AL yang terbatas jumlahnya untuk menjaga kedaulatan dan hukum di Samudera Indonesia. Kedua, AL Australia tidak memahami hukum Laut Internasional tentang *Hot Pursuit* dimana pengejaran akan berhenti apabila kapal yang dikejar telah memasuki teritorial negara lain. Sebagai tentara yang profesional tentunya perwira AL Australia tidak mungkin tidak tahu masalah ini. Tetapi karena tidak adanya KRI maka mereka dengan seenaknya memasuki wilayah RI. Dalam hubungan internasional, insiden pelanggaran wilayah perairan itu telah mengubah ancaman keamanan dari nontradisional (pencari suaka) menjadi ancaman tradisional (pelanggaran wilayah oleh militer Australia). Ketika karakter dan bentuk ancaman keamanan itu berubah maka bentuk respon dan aktor yang berperan pun berubah. Apa yang dipertontonkan kapal perang Australia adalah *Gun Boat Diplomacy*, yang salah penerapannya dengan melanggar hukum Laut Internasional. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melakukan protes melalui jalur diplomasi dan mekanisme yang ada. H.J. Morgenthau mengatakan bahwa diplomasi adalah otak dari kekuatan nasional dan moral nasional adalah jiwanya (*diplomacy is the brains of national power, as national morale is its soul*). Kalau ini yang terjadi maka seperti dikatakan oleh Frederick the Great bahwa "*diplomacy without force is like music without instrument*" (diplomasi tanpa kekuatan/paksaan adalah seperti musik tanpa instrumen). Indonesia tidak

³ Hikmawanto Juwana, "Australia Mengancam Kedaulatan Indonesia", *Suara Merdeka*, 9 Februari 2014.

akan dihargai bangsa lainnya karena tidak mempunyai kekuatan yang memadai, khususnya kekuatan Angkatan Laut yang kredibel.

Dari latar belakang di atas, diketahui bahwa dilihat dari perkembangan hubungan geopolitik dan geostrategi, nampaknya diplomasi pertahanan (khususnya *Naval Diplomacy*) memegang peran penting dengan keamanan laut (*maritime security*) dan menjadi ujung tombak dalam perhatian hubungan keamanan regional di Asia Pasifik dengan diimbangi kekuatan Angkatan Bersenjata yang memadai. Edward Luttwak "*the political use of sea power*" dan Ken Booth dalam bukunya "*Navies and Foreign Policy*" mengupas ide ini lebih jauh peran AL dalam militer, polisional dan diplomasi.⁴ Tesis ini telah menjadi teori yang dianut bangsa-bangsa di dunia, walaupun di dalam survei semacam ini tidak bisa menghindari pengertian diplomasi AL yang sangat umum dan kemudian dilengkapi dengan spesialisasi pekerjaan yang memfokuskan terhadap keadaan khusus krisis dan Angkatan Laut. Dalam membicarakan Diplomasi Angkatan Laut (*Naval Diplomacy*) memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah diplomasi AL adalah setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Sejak zaman dulu AL dipakai sebagai alat diplomasi baik secara persuasif maupun koersif. Tentu saja strategi maritim haruslah sejalan dengan strategi nasional dan tujuan politik yang ingin dicapai pemimpin negara.⁵ Dalam hubungan internasional, instrumen-instrumen politik luar negeri terdiri dari lima macam yaitu diplomasi, propaganda dan *political warfare*, ekonomi, imperialisme dan kolonialisme dan perang. Instrumen tersebut digunakan oleh negara untuk melaksanakan politik nasional guna mencapai kepentingan nasionalnya. Akhir-akhir ini dalam strategi kontemporer, penggunaan Angkatan Laut semakin luas baik sebagai militer untuk perang, maupun militer bukan untuk perang, untuk menghadapi hal-hal keamanan dan masalah lain yang eskalasi perubahannya begitu cepat.

Dalam bahasan berikut penulis mencoba mengkaji diplomasi sebagai bahan pembelajaran, apakah yang dimaksud dengan diplomasi, bagaimana kedudukannya dalam hubungan internasional, apakah yang dimaksud dengan diplomasi pertahanan dan diplomasi AL, apa yang bisa dilakukan Angkatan Laut ke depan di abad XXI, peran dan

⁴ Geoffrey Till, "*Sea Power: A Guide For the Twenty First Century*", (London: Frank Cash Publisher, Portland, 2004).

⁵ Soewarso, *Kumpulan Evolusi Pemikiran Strategi*, (Jakarta: Seskoal, 1986). Buku ini di cetak untuk kalangan terbatas Siswa Seskoal.

struktur apa yang dibutuhkan dan kesiapan sumber daya manusia dan alat utama yang bagaimana yang harus dimiliki.

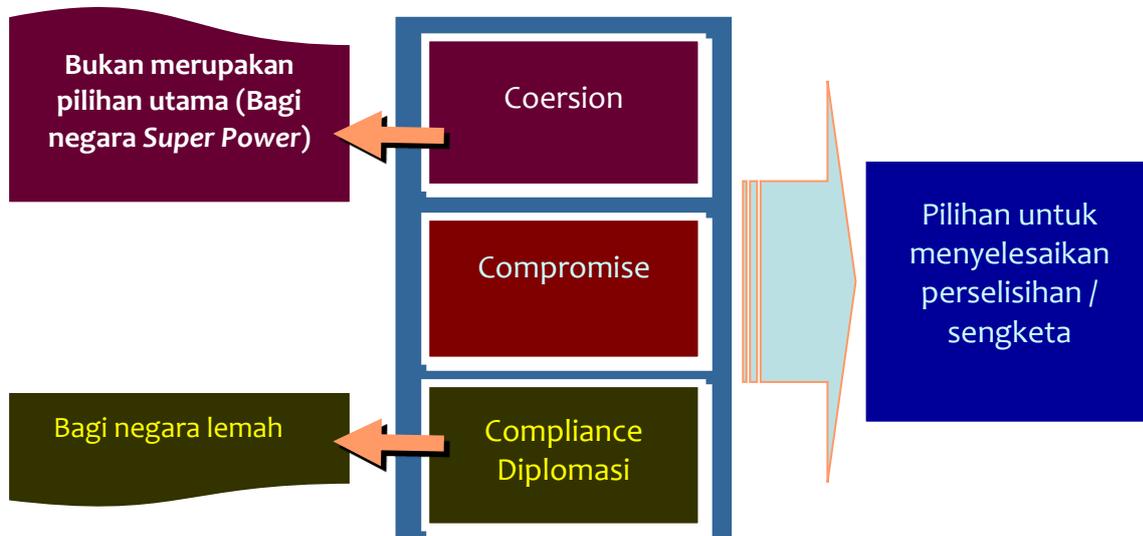
Pemahaman Diplomasi

Dari studi mengenai diplomasi didapat beberapa pengertian/definisi mengenai diplomasi. *Pertama*, menurut *Oxford Dictionary*, diplomasi adalah pelaksanaan dari hubungan internasional melalui perundingan atau metode/cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan. *Kedua*, menurut *Webster Dictionary*, diplomasi adalah seni dan praktek penyelenggaraan negosiasi antar bangsa seperti dalam hal menyelenggarakan perjanjian. *Ketiga*, Quincy Wright dalam karyanya "*The Study of International Relationship*", menyatakan diplomasi adalah penggunaan taktik, *skill* di dalam negosiasi dan transaksi. Sedangkan keempat, menurut Sir Ernest Satof dalam karyanya "*Guide to Diplomatic Practice*", menyatakan diplomasi adalah suatu aplikasi intelijen dan taktik pada kaidah-kaidah hubungan antara pemerintah dan negara-negara yang merdeka. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.⁶ Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan diplomasi merupakan cara hubungan internasional yang digunakan oleh suatu negara baik melalui perundingan, intelijen, taktik dan seni bernegosiasi untuk mencapai tujuan politiknya. Diplomasi seperti hubungan internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang sedang tumbuh/masih muda, ilmu pengetahuan yang baru lahir sesuai kebutuhan manusia akan perdamaian. Dalam hubungan internasional, diplomasi terdiri dari tiga jenis: *Coersion Diplomacy* atau diplomasi dengan menggunakan kekerasan, *Compromise Diplomacy* atau diplomasi secara kompromi/jalan tengah, *Compliance Diplomacy* atau diplomasi untuk menuntut (*yielding to coersion*).

⁶ Wikipedia, "Diplomasi", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>, diunduh pada 10 Juli 2014.

Gambar 1. Penggunaan Diplomasi

PENGGUNAAN DIPLOMASI



Sumber: diolah penulis.

Coersion/Coersive Diplomacy adalah diplomasi dengan menggunakan kekerasan dan ini hanya dapat dilakukan oleh negara yang mempunyai power, apakah power ini secara politis, administratif, ekonomi atau sebagai hasil dari kerja sama yang terorganisasi. Salah satu bentuk *coersion diplomacy* adalah *implicit coercion diplomacy*. Yang dimaksud dengan *Implicit Coercion Diplomacy* adalah diplomasi dengan menggunakan kekerasan yang terselubung atau yang dikenal dengan diplomasi mentega dan roti. Contoh *Implicit Coersion* :

- 1) Pada hubungan Amerika Serikat dan Inggris atau Soviet dengan Finlandia. Biasanya Inggris dan Finlandia menjelaskan kepada pemerintahnya kerugian-kerugian yang akan diperoleh jika mereka menolak permintaan AS atau Soviet.
- 2) Pada hubungan AS dengan negara lain dalam hal pemberantasan teroris yang terjadi pasca tragedi WTC tahun 2001, dimana dalam memberantas teroris, Amerika menerapkan diplomasi *stick and carrot*. Terhadap negara yang mendukung AS dalam hal pemberantasan teroris akan diberi *carrot*, sebaliknya negara yang mendukung teroris akan diberi *stick*.

Coercive diplomacy dapat dibedakan dari diplomasi biasa dan kemampuannya untuk mengarahkan tindakan secara langsung atau untuk menjadi *coercive*. Sebagai

contoh, seluruh negara yang mempunyai kemampuan nuklir selalu mengarahkan rudalnya satu sama lain (*coercive diplomacy*). Tetapi bila salah satu negara yang mempunyai rudal tersebut menyatakan akan menembakkan rudal tersebut bila negara sahabat mereka diserang, maka ini bukan *coercive diplomacy*, tetapi ini merupakan pola-pola dari *implicit coercion*, karena hal tersebut tidak berhubungan dengan sengketa tertentu secara langsung.

Compromise Diplomacy adalah diplomasi secara kompromi/ jalan tengah yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari sengketa, walaupun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Pada umumnya sulit untuk melihat sifat “kompromi” setelah posisi yang berlawanan dinyatakan dan sengketa dimulai. Kompromi tidak selalu digunakan dalam hal mencari jalan tengah antara aspirasi-aspirasi konflik dari pihak yang bersengketa. Kompromi juga menggambarkan tindakan dari kemungkinan kekerasan yang akan diambil oleh kedua pihak yang bersengketa.

Compliance Diplomacy atau diplomasi untuk menuntut dan dapat digunakan sebagai alternatif pilihan, bila dalam sengketa yang mengarah ke perang dan diperkirakan tidak ada satupun yang menang.

Ketiga jenis diplomasi baik *coercion*, *compromise* dan *compliance*, semuanya adalah pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa. Bagi negara super power, diplomasi kekerasanpun bukan merupakan pilihan utama dan sebaliknya bagi negara lemah umumnya memilih alternatif pada *compliance diplomacy*.

Dalam aplikasi di lapangan terdapat *coercive naval diplomacy*, yakni kekerasan tidak berdarah, artinya menggunakan kekuatan AL sebagai suatu “ancaman”, tetapi tidak digunakan secara fisik. Mengapa dikatakan tidak berdarah, karena: pertama, *coercive naval diplomacy* merupakan instrumen yang digunakan untuk negosiasi antar bangsa. Kedua, kekuatan yang digunakan adalah kekuatan angkatan laut berbeda dengan kekuatan ekonomi atau lain-lain instrumen kebijakan. Ketiga, bersifat *coercive*, bertujuan untuk mempengaruhi perilaku melalui ancaman yang akan menyakitkan dengan penghukuman, bukan hanya melalui *positive inducement* (bujukan) seperti pada *cooperative diplomacy*. Aset utamanya adalah nilai ekonomi dari darah dan harta yang terkait di kedua pihak untuk dinegosiasikan. Obyeknya adalah untuk tetap menjaga

“event” dalam wilayah pembicaraan dengan menghindari tindakan fisik. Satu pihak menunjukkan sebuah grafik ancaman dan konsekuensi jika tidak menuruti, bila asumsi di belakang ancaman tersebut benar, dia akan bekerjasama. Satu kunci sukses dari *coercive diplomacy* adalah *moderation*. Negara tujuan, kecuali sangat mudah panik, jarang setuju jika mereka tahu bahwa jika menuruti kehendak negara lain biayanya lebih besar dibandingkan jika mereka menolak untuk bekerjasama.

Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Militer

Diplomasi Pertahanan

Sejak awal sejarah, banyak pikiran besar peperangan ditujukan untuk memahami pengaruh yang tak terelakkan dan kegiatan keterlibatan militer dalam urusan pertahanan yaitu perang dan non perang. Diplomasi pertahanan, dapat dipahami sebagai penerapan damai sumber daya dari seluruh spektrum pertahanan, untuk mencapai hasil positif dalam pengembangan hubungan suatu negara bilateral dan multilateral.⁷ Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster, diplomasi pertahanan secara tradisional merupakan penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri.⁸

Tujuan diplomasi pertahanan untuk memperbaiki hubungan antarnegara melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan resiko serta biaya rendah. Dalam perkembangan yang ada, diplomasi pertahanan mencakup kegiatan berupa: 1) Aktivitas kerja sama yang dilakukan militer dan infrastruktur terkait pada masa damai. 2) Diplomasi pertahanan melibatkan kerja sama militer dalam isu yang lebih luas, mulai dari peran militer sampai peran non-tradisional, seperti penjaga keamanan (*peacekeeping*), penegakan keamanan (*peace enforcement*), mempromosikan *good-governance*, tanggap bencana, melindungi HAM, dan lain-lain. 3)

⁷ Wikipedia, “Diplomasi Pertahanan”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi_pertahanan, diunduh pada 10 Juli 2014.

⁸ “Kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan Indonesia untuk tujuan peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia dan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara.” Lihat, Arifin Multazam, *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, (Depok: FISIP UI, 2010). (tesis).

Kerja sama militer dilakukan dengan sekutunya, antar negara, bahkan kerja sama dengan negara yang sedang bersaing.⁹

Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang melibatkan aktor negara (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen), dan organisasi non-pemerintah, *think tank* serta masyarakat sipil. Diplomasi pertahanan dilakukan pada masa damai menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri. Bedanya dengan diplomasi militer, dimana diplomasi militer fokus hanya pada penggunaan kekuatan militer dalam diplomasi terkait isu-isu keamanan saja. Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.

Diplomasi Militer

Diplomasi militer adalah diplomat militer yang melakukan negosiasi dan hubungan dengan bangsa lain, militer, dan warga negara yang bertujuan mempengaruhi lingkungan dimana militer melakukan operasi. Upaya ini mencakup aspek diplomasi tradisional, serta aspek diplomasi informal publik. Pihak militer melakukan hubungan formal dengan pemerintah dan militer mereka, serta hubungan informal. Termasuk interaksi pribadi yang terjadi selama perjalanan, sehingga memberikan kontributor kunci untuk upaya-upaya diplomasi publik RI di luar negeri. Bentuk keputusan-keputusan kebijakan luar negeri berupa pengembangan dan pelaksanaan program-program diplomasi militer yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negeri. Unsur-unsur kekuatan nasional digunakan secara terpadu yaitu Diplomasi, Informasi, Militer, Ekonomi, Keuangan, Kecerdasan, dan Penegakan Hukum (*Diplomacy, Information, Military, Economy, Finance, Intelligence, Law Enforcement/DIMEFIL*).

Diplomasi militer digunakan pada tingkat strategis, operasi, maupun taktik. Dalam melaksanakan diplomasi militer: Pertama, bahwa militer tidak melakukan diplomasi sebagai bagian dari pekerjaan sehari-harinya setelah misi ditetapkan, tetapi militer/TNI

⁹ Bhubhinder Singh dan See Seng Tan, *Defence Diplomacy in Southeast Asia, From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia*, (Singapore: RSIS, 2011); dan Goldy Simatupang, dalam "Diplomasi Pertahanan ASEAN Dalam Rangka Stabilitas Kawasan", *Forum Pertahanan dan Kajian Maritim*, 22 Oktober 2013, dalam <http://www.fkpmaritim.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/>, diunduh pada 11 juli 2014.

mempunyai tugas pokok sendiri. Kedua, bahwa diplomasi militer merupakan alat penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan strategis luar negeri RI dan teater/arena untuk tujuan strategis. Kewenangan diberikan kepada komandan tempur lapangan dalam memfasilitasi pengembangan, sumber daya dan pelaksanaan program-program diplomasi militer dalam satu kesatuan rantai komando. Satuan tempur/kombatan dilengkapi dengan staf yang mampu dalam melaksanakan tugas, dan secara historis terbukti telah terstruktur dan tercantum dalam doktrin. Para komandan tempur mempunyai jaringan yang luas dan organisasi personil yang baik, diposisikan untuk berkoordinasi dan bekerjasama di beberapa tingkat wewenang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan diplomasi militer. Akhirnya, sumber daya yang unggul yaitu para staf perwira militer, untuk melaksanakan diplomasi militer, memungkinkan fleksibilitas yang besar dan responsif saat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kompleks. Seperti banyak aspek sejarah perang, diketahui bahwa pencapaian puncak dalam diplomasi militer terjadi selama dan setelah Perang Dunia II. Akhir dari Perang Dunia II ini banyak terjadi kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia termasuk kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁰

Diplomasi Militer Indonesia

Dimulai sejak zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya dengan zaman keemasan bahari, militer digunakan untuk perang dan selain perang. Sejak Kemerdekaan, diplomasi militer digunakan seiring diplomasi politik, dengan cara negosiasi, kunjungan, permintaan bantuan, afiliasi politik dengan negara lain, maupun melalui pembelian senjata, pelatihan dan pendidikan. Diplomasi militer diartikan sama dengan diplomasi pertahanan yang dilaksanakan atas koordinasi Kementerian Pertahanan melalui kerja sama pertahanan di kawasan. Diplomasi militer Indonesia mencapai puncaknya ketika dilaksanakan pameran kekuatan berupa kampanye militer perebutan kembali Irian Barat/Papua. Gabungan antara diplomasi, intelijen, militer dan ekonomi serta kekuatan nasional lainnya telah membuktikan keberhasilan pemerintah RI, dengan diserahkannya Irian Barat ke pangkuan RI. Sejak diundangkannya UU no 34 Tahun 2004 tentang TNI, diplomasi menjadi alat perjuangan TNI, salah satunya sesuai pasal 9 menjadi tugas diplomasi TNI AL. Selain

¹⁰Tim Pokja Kajian Pusjianstra TNI “Doktrin Tridek TNI”, Pusjianstra TNI, Jakarta, Maret 2009. Kajian ini menjadi bahan utama Doktrin TNI yang diresmikan tahun 2012.

itu untuk TNI AD, AL, dan AU melakukan *army to army talk*, *navy to navy talk* dan *airman to airman talk*, para perwira melakukan kunjungan ke luar negeri, baik resmi dan non resmi.

Implementasi Diplomasi Pertahanan Melalui Kerja sama Pertahanan

Diplomasi pertahanan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan, antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia di tingkat global, regional, dan bilateral.

Inisiatif pengaturan keamanan ASEAN dilakukan melalui berbagai mekanisme diplomatik seperti *ASEAN Ministerial Meeting*, *ASEAN Regional Forum*, *Shangrila Dialogue* (yang baru saja dilakukan di Singapore), *ASEAN + 1*, dan *ASEAN + 3*. Saat ini, forum-forum tersebut masih belum mengarah ke formalisasi dan/atau institusionalisasi kerja sama keamanan di Asia Tenggara. Forum-forum tersebut masih mengandalkan keberadaan proses-proses diplomatik yang diharapkan akan meningkatkan rasa saling percaya (*trust building*) antarnegara.¹¹

Di tingkat regional, diplomasi pertahanan Indonesia sangat diwarnai tarik menarik antara keinginan negara-negara ASEAN untuk menginisiasi pengaturan keamanan (*security arrangement*) yang ditopang pilar-pilar TAC, Zopfan, Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara, serta *ASEAN Security Community*, dengan politik realis AS untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara.

Selain ARF dan ADMM, ASEAN juga memiliki beberapa dialog tingkat tinggi militer. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara bertemu setiap tahun dalam pertemuan-pertemuan seperti *the ASEAN Chiefs of Defence Forces Informal Meeting* (ACDFIM) sejak 2001, *the ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting* (ACAMM) sejak 2000, *the ASEAN Navy Interaction* (ANI) sejak 2001, and *the ASEAN Air Force Chiefs Conference* (AACC) sejak 2004. Ada pula pertemuan reguler *ASEAN Military*

¹¹ "Diplomasi Pertahanan Indonesia-AS", (Jakarta: Mabes TNI, 2014), dalam <http://www.tni.mil.id/view-2707-diplomasi-pertahanan-indonesia-as.html>, diunduh pada 8 juli, 2014.

Intelligence Informal Meeting (AMIIM). Pembahasan dalam dialog ini masih tertuju pada isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, bencana alam, penyakit menular, keamanan pangan dan energi, perubahan iklim, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal dan pembajakan.

Diplomasi Angkatan Laut (*Naval Diplomacy*)

Tugas Diplomasi Angkatan Laut

Hal menarik lainnya yang menjadi pembahasan tulisan ini adalah diplomasi Angkatan Laut. Dengan disahkannya UU TNI No. 34 Tahun 2004, sesuai dengan pasal 9 ayat 3 dinyatakan salah satu tugas pokok TNI AL adalah “melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah”.¹² Dengan demikian legitimasi diplomasi AL telah dimiliki TNI AL. Dalam kenyataannya, dari tiga peran AL baru masalah militer dan polisional yang sudah banyak dibahas, bahkan sudah terstruktur dengan institusinya baik Gugus Tempur Laut (Guspurla) maupun Gugus Keamanan Laut (Guskamla) di Komando Armada Timur dan Komando Armada Barat. Pada implementasi secara nyata di lapangan, peran diplomasi AL dilaksanakan oleh KRI sebagai unsur “*Showing the Flag*”, tidak terstruktur, tetapi dikemas dalam bentuk kegiatan lain, seperti muhibah, *passex*, kehadiran di kawasan tertentu dan bahkan ada upaya lebih luas dari TNI AL untuk menjadi Angkatan Laut kelas Dunia (*World Clas Navy*).¹³ Mengingat pentingnya diplomasi AL dan implementasinya, sudah saatnya dikembangkan dalam struktur organisasi tersendiri yang diawaki pada masa damai dan masa perang.

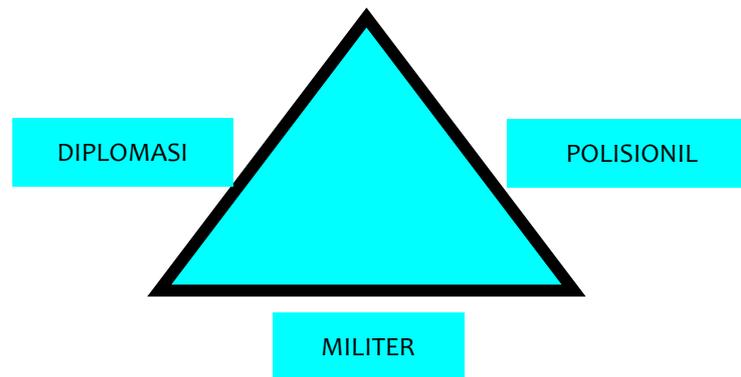
Diplomasi Angkatan Laut

Diplomasi Angkatan Laut, seperti namanya merupakan bagian dari diplomasi dan secara tradisional, Angkatan Laut memiliki peran-peran yang unik. Peran tersebut adalah :

¹² UU TNI, No 34 Tahun 2004, Pasal 9.

¹³ Orasi Ilmiah Kepala Staf TNI AL pada wisuda Sarjana Universitas Hang Tuah, 2014.

Gambar \triangle Melambangkan Trinitas Peran Universal Angkatan Laut



- a. Peran militer, yang ditegakkan dalam rangka menegakkan kedaulatan di laut dengan cara mengupayakan pertahanan negara dan pangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap rencana militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.
- b. Peran polisional (*constabulary*), yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.
- c. Peran diplomasi (*naval diplomacy*, unjuk kekuatan angkatan laut, *gun boat diplomacy*) merupakan dukungan diplomasi dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara baik dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

Penggunaan Kekuatan Laut dalam Diplomasi

Penggunaan kekuatan laut dalam mendukung politik luar negeri tidak dengan menggunakan senjata, tetapi kekuatan laut ini digunakan sebagai suatu isyarat atau pesan. Penggunaan kekuatan laut ini dapat dilakukan dengan pesan/isyarat sebagai berikut: mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasikan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh *bargaining power* yang lebih baik dalam menciptakan

pembentukan pengaruh suatu negara terhadap negara lain baik pada masa damai maupun perang.

Pada masa damai, dilakukan dalam bentuk kunjungan kapal perang ke suatu negara. Kunjungan kapal perang Taiwan ke Indonesia, hampir setiap tahun adalah suatu contoh diplomasi AL yang bertujuan untuk menyatakan eksistensi/keberadaan Taiwan terhadap masyarakat internasional, bahwa Taiwan diakui oleh banyak negara sebagai negara berdaulat, dalam rangka menghadapi kebijakan RRC yaitu “one China policy“. Muhibah ini juga disebut pameran bendera (*Showing The Flag*). *Naval diplomacy* dikatakan sebagai penggunaan kapal perang untuk mendukung politik luar negeri suatu negara dengan cara memberi sinyal dan bukan dengan cara melepaskan tembakan. Pada intinya adalah komunikasi yaitu dengan cara bernegosiasi dengan menunjukkan kemampuan/kekuatan yang kita miliki yang lebih dikenal dengan *showing the flag*.

Dalam keadaan bermusuhan, maka tindakan *naval diplomacy* diharapkan dapat memberikan tekanan psikologis yang mendalam terhadap negara lain, sehingga dampaknya dapat menghilangkan niat bermusuhan (*hostile intent*) atau tindakan permusuhan (*hostile act*). Diplomasi AL pada saat menghadirkan kekuatan untuk menakuti lawan, bila perlu menghancurkan lawan dengan kekerasan bersenjata lebih dikenal dengan *Gun Boat Diplomacy*.

Menurut Ken Booth dalam bukunya “*Navies and Foreign Policy*” ada lima taktik dalam *naval diplomacy* yaitu : 1) *Standing demonstrations of naval power*; 2) *Specific operational deployments*; 3) *Naval Aid*; 4) *Operational visits*; 5) *Specific goodwill visits*. Sedangkan menurut Cromwell sebagai alat diplomatik kapal perang mempunyai tujuh aspek dasar yaitu : 1) *versatility*; 2) *controllability*; 3) *mobility*; 4) *projection ability*; 5) *access potential*; 6) *symbolism*; 7) *endurance*. Dari dua pendapat yang dimaksud, substansinya menggunakan kapal perang sebagai alat diplomasi dengan kelebihan: kehadirannya/lamanya di suatu daerah, kemampuan kekuatannya dan kekhasan untuk memberikan dampak penangkalan terhadap lawan atau bakal lawan yang dituju. Sementara itu, beberapa referensi mengenai *naval diplomacy*, umumnya memuat studi kasus tentang *naval diplomacy* di beberapa negara. Isinya secara umum mengulas dan menganalisis pengiriman kapal perang dalam rangka diplomasi, termasuk

keberhasilannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak yang dihasilkan baik “*Showing the Flag*”, maupun “*Gun Boat Diplomacy*”.

Baik kapal perang berfungsi untuk *Showing the Flag* atau *Gun Boat Diplomacy*, diplomasi Angkatan Laut intinya adalah pameran bendera (*Showing The Flag*) dan hampir sama dengan propaganda yaitu penimbulan situasi yang diharapkan dapat memberikan opini terhadap negara lain, sehingga akan menguntungkan negaranya termasuk diplomatnya. Dengan membentuk citra terhadap kekuatan militer dan Angkatan Laut yang besar, akan mengesankan pemerintah lain dan sekaligus akan dapat mempengaruhi mereka. Untuk ini diperlukan lebih dari sekedar membentuk armada yang besar. Kekuatan harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan kemungkinan bahwa kekuatan mereka akan diperhitungkan, baik untuk mendukung kawan maupun menghancurkan musuh. Persamaan antara *Gun Boat Diplomacy* maupun *Showing The Flag* yaitu *coersive* atau pemaksaan, sedangkan perbedaannya, *Showing The Flag* lebih halus dan bermartabat, tidak terlalu menakuti lawan atau bakal lawan. Hal ini sesuai dengan ajaran Sun Tzu “mengalahkan lawan tanpa senjata”.¹⁴

Pameran bendera atau *showing the flag*, paling banyak digunakan oleh TNI AL baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejalan dengan visi TNI AL sekarang yaitu besar, kuat dan profesional. Kedua elemen untuk mendukung kawan ataupun menghancurkan musuh adalah inti dari bisnis pameran bendera. Dengan kekuatan laut yang besar akan membawa dampak *coercive* (paksaan) kepada negara lain agar mengurungkan niat bermusuhan. Bentuk dari kegiatan pameran bendera antara lain: *Diplomatic Port Visits*, latihan bersama AL dengan negara lain dan kegiatan kerja sama diplomasi seperti operasi penghancuran ranjau di negara ketiga.

Implementasi Diplomasi Angkatan Laut

Berikut ini akan disampaikan implementasi diplomasi AL di berbagai negara dalam rangka mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasikan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara antara lain:

¹⁴ Wee Chow, *Sun Tzu: War & Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1993).

a. Diplomatic Port Visit.

Soviet sejak tahun 1924 sudah mulai melaksanakan *diplomatic port visit*. Setelah 14 tahun dimulainya Perang Dunia II, pada tahun 1953 Soviet mengirimkan kapal *Cruiser* kelas *Sverolov* ke *Spithead* (Inggris) dalam rangka pemakaman Ratu Elizabeth. Empat tahun kemudian pada tahun 1957, *Cruiser* kelas *Sverolov* lainnya didampingi sebuah *Destroyer* tiba di Latahia, Suriah. Kampanye ini berkaitan dengan *Affair Zhukov*. Antara tahun 1953 sampai dengan 1966, Soviet hanya melakukan *Port Visit* sebanyak 37 kali, terutama ke Eropa Barat. Tetapi lima tahun berikutnya, jumlah tersebut bertambah menjadi 5 kali. Dalam tahun 1967 sampai dengan 1976 dilaksanakan 170 *Visit* ke 50 negara.

b. Latihan serta Demonstrasi.

Pameran bendera dengan melibatkan kekuatan laut yang besar adalah yang dilakukan oleh Soviet yang diberi nama sandi *Exercise Verna (Spring)* dan dilaksanakan April 1975 yang di Barat diberi nama *Okean-75* dengan melibatkan kurang lebih 220 kapal. Latihan tersebut merupakan latihan AL terbesar sejak Perang Dunia I dan meliputi seluruh Samudera yang mengelilingi benua *Euroasia*.

c. Penyapuan Ranjau di Bangladesh dan Mesir.

Kekuatan penyapu ranjau Rusia merupakan yang terbesar di dunia dan telah dua kali digunakan dalam mendukung politik luar negeri Soviet. Pada musim semi 1972, 6 penyapu ranjau dan lebih dari 6 kapal bantu diberangkatkan ke Bangladesh untuk membersihkan ranjau di pelabuhan, yang hampir hancur pada saat perang India-Pakistan tahun 1971. Pada tahun 1974, satuan ranjau yang lebih besar melaksanakan operasi di Selat Subal pada bagian Selatan ke arah Terusan Suez.

d. Peristiwa Trikora Tahun 1960-an, dimana seluruh kapal angkatan laut sudah disiapkan, lengkap dengan skenario pendaratan amfibi di Irian Barat.

Naval diplomacy pada peristiwa Trikora merupakan bagian reaksi dari upaya diplomasi terbaik, dalam hal ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB. Dengan

tindakan Indonesia yang tidak diduga tersebut, disusul dengan persiapan pendaratan amfibi, maka PBB dan AS mendorong Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia.

e. Kasus Pengusiran Kapal Ferry Portugal yang bernama *Lusitania Ekspreso* oleh TNI AL pada tanggal 11 Maret 1992.

Kapal ini bermaksud membawa orang-orang yang akan menabur bunga di perairan Dili, tujuannya sangat jelas yaitu untuk mendramatisir insiden *Santa Cruz* bulan November 1991 untuk kepentingan politik anti integrasi yang didukung Portugal. Keberhasilan TNI AL dalam mengusir *Lusitania Ekspreso* untuk kembali ke Darwin merupakan peran *naval diplomacy* yang berhasil. TNI AL melaksanakan *demonstrations of naval power*, dengan kehadiran beberapa KRI di Dili, sedang usaha Atase laut di Australia untuk meyakinkan keseriusan Angkatan Laut Indonesia sebagai Angkatan Laut yang profesional merupakan *naval diplomacy* yang berhasil membawa pesan diplomasi.

f. Pengiriman kapal-kapal perang AS dan Inggris ke Selat Hormuz pada perang Irak-Iran tahun 1980-an.

Maksud kedatangan angkatan laut kedua negara tersebut adalah untuk mengurungkan niat Iran yang akan menutup jalur pasokan minyak dari Teluk ke Eropa dan Jepang. Cukup dengan mengirimkan kapal perang, tanpa menembakkan 1 butir pelurupun, Selat Hormuz tetap dibuka sesuai dengan keinginan kedua negara tersebut.

g. Insiden *Pueblo*.

Pada tanggal 23 Januari 1968, kapal patroli Korea Utara menangkap *USS Pueblo* milik Amerika. Korea Utara mengatakan bahwa kapal tersebut ditahan karena melanggar batas teritorialnya. Amerika Serikat merespon dengan mengirimkan kekuatan lautnya ke laut Jepang. Setelah melaksanakan negosiasi di Panmunjom, Korea Utara melepas ABK *Pueblo* dengan pernyataan maaf.

h. Insiden Bawean tanggal 2 Juli 2003.

Sejumlah kapal Armada VII AS yang terdiri dari 1 buah kapal induk *USS Carl Vinson*, 2 buah Fregat dan 1 buah tanker melakukan pelintasan dari Singapura melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I menuju ALKI II lewat Laut Jawa. Dengan alasan *Freedom of Navigation* (FON), di sekitar Kepulauan Bawean, 4 buah pesawat F – 18 hornet dari kapal induk tersebut melakukan manuver di udara sampai ketinggian 35.000 kaki yang membahayakan penerbangan sipil. Padahal PP no. 37/2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan telah berlaku efektif tanggal 28 Desember 2002. Artinya pesawat udara tersebut tidak boleh terbang di atas Pulau Bawean, karena melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia. Peristiwa tersebut dapat dinilai merupakan pameran bendera oleh AS, karena AS barangkali ingin menunjukkan bahwa ALKI dibuat tidak hanya dari Utara ke Selatan dan sebaliknya, tetapi juga perlu dibuat dari Timur ke Barat dan sebaliknya. Pesan lain adalah isyarat Amerika tentang sikap politik Indonesia yang tidak sejalan dengan AS tentang HAM, penanganan terorisme dan lain-lain. Pada intinya isyarat tersebut mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasikan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara bahwa AS mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan atau melaksanakan kehendaknya.

i. Kasus Ambalat.

Sengketa masalah perbatasan antara RI – Malaysia di perairan Karang Unarang Kalimantan Timur yang di kenal Blok Ambalat, telah melibatkan unsur-unsur kapal perang angkatan laut kedua negara (TNI AL – TLDM). Dalam masalah ini tidak terjadi pertempuran namun hanya saling berhadapan di perairan yang di sengketakan. TNI AL melakukan *Gun Boat Diplomacy* sehingga menarik pemerintah kedua negara ke meja perundingan. Hal ini juga merupakan *naval diplomacy* yang berhasil dilaksanakan oleh TNI AL. Kerja sama yang bagus antara Kementerian Luar Negeri dan TNI AL serta *public relation* di media masa telah membentuk semangat “*winning the war*” yang luar biasa. Peristiwa ini telah membawa perubahan

dukungan politikus dan rakyat terhadap tindakan TNI, khususnya TNI AL dengan keseriusan untuk mobilisasi masyarakat dan membuka mata dan telinga bangsa Indonesia untuk sadar dalam membela tanah airnya dari ancaman negara lain. Peristiwa inilah yang menyadarkan bangsa Indonesia untuk memiliki Angkatan Laut yang kuat dan memadai. Dengan demikian pesan dari diplomasi AL mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasikan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara dapat tercapai

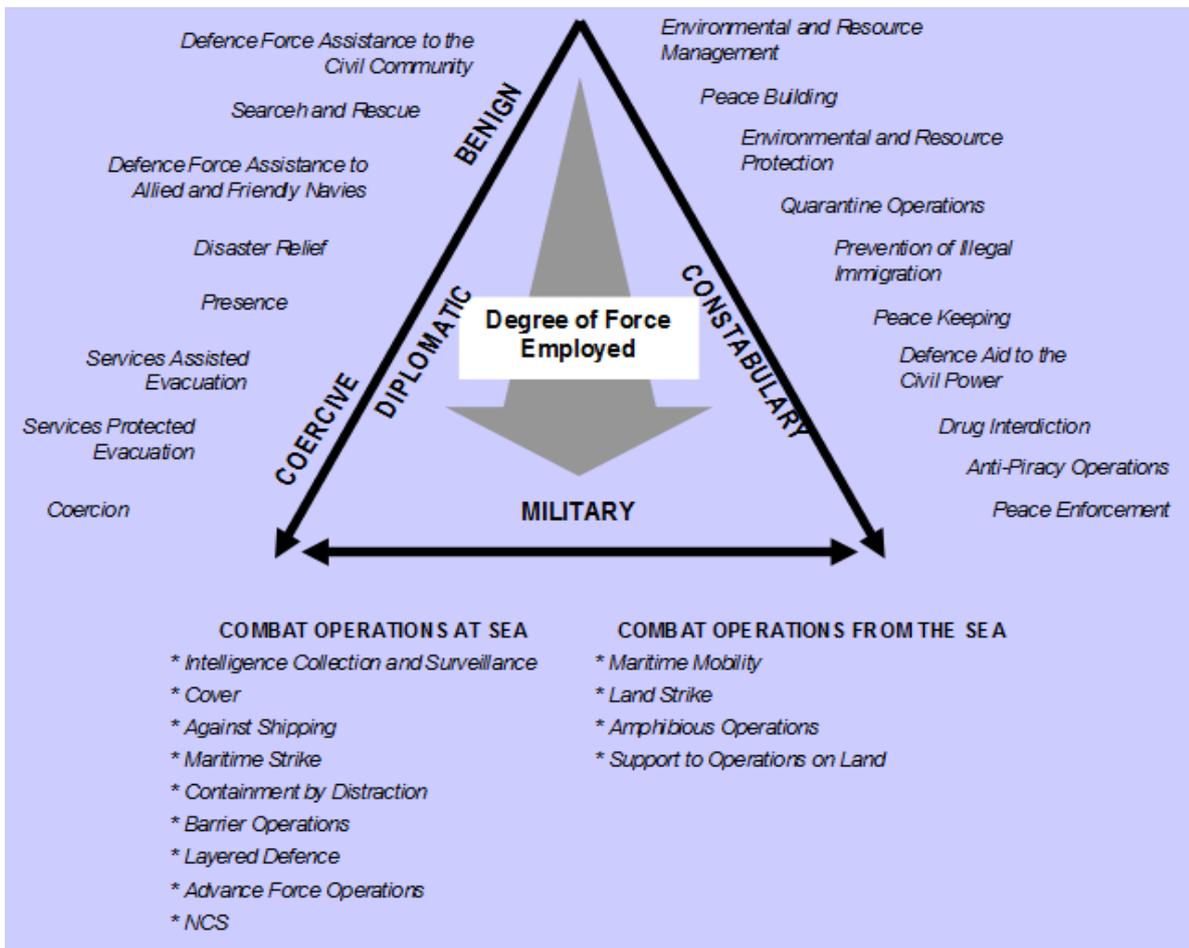
j. Antara hubungan internasional dan *naval diplomacy* terdapat hubungan yang erat sekali.

Sebagai contoh pada kasus penyediaan fasilitas pangkalan militer oleh Singapura kepada AS, bagi Singapura hal tersebut merupakan hubungan internasional, tetapi bagi AS hal tersebut dapat dinilai sebagai pameran bendera. Di dalam *naval diplomacy*, banyaknya kapal perang dengan kualitas senjatanya sangat menunjang dalam membangun pengaruh (*Influence Building*). Suksesnya *naval diplomacy* tidak hanya tergantung oleh kehadiran kapal perang di laut, tetapi juga tergantung pada kemampuan para diplomat negara tersebut untuk memanfaatkan kapal perangnya.

Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Angkatan Laut (*Naval Diplomacy*) ke Depan

Diplomasi pertahanan termasuk di dalamnya Diplomasi AL ke depan akan semakin penting mengingat spektrum tugas yang semakin luas, sesuai gambar berikut:

Gambar 2. Spektrum Tugas Angkatan Laut



Sumber: Eric Grove, *The Future of Sea Power*, (London: Routledge, 1990)

Peran diplomasi AL antara lain dimulai dengan skala *Benign* ke *Coercive* yaitu mulai dari perbantuan kekuatan kepada komunitas sipil, *search and rescue*, bantuan kepada aliansi dan negara AL sahabat, kehadiran di laut (*naval presence*), bantuan evakuasi, membantu perlindungan evakuasi sampai tindakan *coercion*. Bagi TNI AL, tugas-tugas ini dapat diemban kecuali aliansi yang memang bukan domain politik Indonesia. Secara umum ke depan, TNI AL akan menghadapi tugas diplomasi sebagai berikut:

- a. Dalam perjalanan berikutnya, di abad XXI ini, diplomasi AL sebagai bagian diplomasi pertahanan, bentuknya telah berkembang bukan hanya kehadiran kapal perang, tetapi kegiatan lain yang mendukungnya seperti berkumpulnya para kepala staf AL negara-negara ASEAN, berkumpulnya para kepala staf AL negara-negara Pasifik Barat dalam wadah simposium (*West Pacific Naval Symposium*/

WPNS). Juga keikutsertaan Perwira TNI AL dalam konferensi, seminar, *workshop*. Hal lain adalah peran TNI AL dalam menyelenggarakan pelatihan pelatih hukum humaniter (*Team of trainer of the law of Arm Conflict*) sebagai *cohost* bersama dengan *International Convention of the Red Cross (ICRC)* yang diikuti oleh 8 negara termasuk Indonesia. Kedua kegiatan tersebut boleh dibilang kesuksesan diplomasi TNI AL dalam perannya untuk menciptakan *Confidence Building Measure (CBM)*. Masih banyak kegiatan diplomasi AL lainnya yang dapat dilaksanakan dengan kehadiran kapal perang, maupun tanpa kehadiran kapal perang ataupun ditindaklanjuti dengan kehadiran kapal perang, kunjungan para pemimpin Angkatan Bersenjata dalam rangka CBM dan lain-lain. Dalam hal ini, diplomasi AL sebagai instrumen politik luar negeri makin menunjukkan eksistensinya.

Isu ke depan akan lebih membutuhkan *naval diplomacy* antara lain: *Pertama*, Delimitasi, isu ini akan menyita banyak perhatian akibat klaim masalah perbatasan, ZEE, *continental shelf*. Dari 92 pulau terluar yang diketahui, 12 pulau mengandung kerawanan yang butuh pengamanan tersendiri. *Kedua*, keamanan maritim, isu ini menyangkut *Transnational Organised Crime*, utamanya di Selat Malaka. *Ketiga*, terorisme maritim. Terdapat kemungkinan skenario terorisme maritim di laut. Terorisme maritim di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura digambarkan oleh sebagian masyarakat umum, khususnya dunia pelayaran adalah hadirnya teroris dengan menggunakan boat kecil berisi bahan peledak yang sedang mengintai dan menunggu hadirnya kapal tanker atau kapal kontainer dari negara tertentu yang sedang melalui Selat Malaka. *Keempat*, pelanggaran wilayah oleh negara tetangga. Dengan belum selesainya masalah perbatasan di daerah perbatasan Malaysia, Singapura, India, Filipina, Timor Leste, Australia dan lain-lain, maka negara-negara tersebut akan terus berusaha menguatkan klaimnya (batas landas kontinen, batas ZEE) termasuk sampai dengan menggunakan kekuatan Angkatan Bersenjata, untuk menunjukkan kepada dunia internasional dalam rangka memperkuat klaim wilayah lautnya (di seluruh wilayah perbatasan). Sebagai contoh adalah negara Malaysia yang banyak melakukan pelanggaran wilayah ZEE dengan melakukan *Law Enforcement*, utamanya di Selat Malaka dan Perairan Ambalat, di Laut Sulawesi, Timur Kalimantan. Khusus dalam menghadapi

operasi perbatasan Australia, selain protes diplomatik adalah dengan operasi kehadiran Kapal Perang TNI AL di Samudera Indonesia, mengamankan pantai Selatan Pulau Jawa dan Sumatera, meningkatkan peran intelijen dan bekerjasama dengan aparat kepolisian dan aparat lainnya untuk mencegah Indonesia digunakan sebagai pangkalan laju imigran gelap menuju Australia. *Kelima*, pasukan multinasional. Umumnya pasukan multinasional digunakan dalam Operasi Militer selain perang. Dengan atas nama PBB, HAM, isu sosial, AS dengan aliansinya akan masuk ke suatu daerah di negara tertentu. Untuk itu secara sistematis, AS membiayai pertemuan, pembentukan *Multinational Augmentation Team (MPAT)*, untuk menyiapkan standar prosedur bila pasukan multinasional ingin masuk ke suatu daerah tertentu. Indonesia, dalam hal ini TNI, ikut serta mengirimkan Perwira untuk hadir dalam diskusi, Olah Yudha, manuver lapangan. *Keenam*, ALKI. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tentang ALKI, menambah tugas AL untuk mengawasi dan menjaganya dalam bentuk operasi di ALKI I, II dan III terhadap kapal-kapal yang menggunakannya.

Kesimpulan

Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Angkatan Laut telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan melalui kerja sama Angkatan Bersenjata, mekanisme regionalisasi, inisiatif keamanan negara ASEAN dan negara kawasan, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi membangun rasa saling percaya (CBM). Khusus untuk AL, *naval gun diplomacy, showing the flag, WPNS, Navy To Navy Talk, passex*, maupun latihan bersama antar Angkatan Laut, kunjungan antar pejabat tinggi militer antar negara Asia Pasifik dalam rangka CBM. Dengan kemajuan informasi dan teknologi, *naval diplomacy* kontemporer telah melibatkan media masa, sehingga hasil kejadian suatu operasi dapat diketahui saat itu juga. Hal ini bertujuan sebagai propaganda untuk mengeksploitasi suatu keberhasilan operasi bagi peningkatan moril pasukan sendiri dan sebaliknya menurunkan moril pasukan lawan.

Diplomasi AL ke depan akan lebih berperan dalam menghadapi isu yang berkembang terutama masalah klaim perbatasan, *continental shelf*, ZEE dan keamanan maritim, ALKI, terorisme maritim. Namun demikian, untuk dapat mempunyai kemampuan

diplomasi yang baik dan dampak *deterrence* dibutuhkan kekuatan yang memadai. Untuk itulah TNI AL dengan pandangannya Besar, Kuat, Profesional yang dicapai pada 20 tahun pertama setingkat *Green Water Navy*, yang saat ini dicapai melalui *Minimal Essential Forces* (MEF) sangatlah tepat. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi dari seluruh perwira TNI AL dan pemangku kepentingan. Bila tidak ada kekuatan, maka benarlah adagium Frederick the Great “*diplomacy without force is like music without instrument*” (diplomasi tanpa kekuatan/paksaan adalah seperti musik tanpa instrumen). Indonesia tidak akan dihargai bangsa lainnya termasuk Australia, karena tidak mempunyai kekuatan yang memadai, dalam hal ini kekuatan Angkatan Laut yang kredibel. Akhirnya semboyan bela negara “Sadumuk batuk sanyari bumi, sun labuhi pecahing dodo, wutahing ludiro, taker pati” (yang artinya walaupun hanya sejengkal jari tanah diduduki, musuh akan dibela dengan berlumuran darah pecahnya dada, bila perlu sampai mati untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara) akan tetap bisa dijaga dengan TNI yang kuat dan diplomasi yang handal. Studi ini memang masih dalam perkembangan, namun demikian penulis yakin bahwa studi ini akan terus berkembang sehingga menghasilkan teori baru tentang diplomasi umumnya dan diplomasi pertahanan khususnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Chow, Wee. 1993. *Sun Tzu: War & Management*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Grove, Eric. 1990. *The Future of Sea Power*. London: Routledge.
- Soewarso. 1986. *Kumpulan Evolusi Pemikiran Strategi*. Jakarta: Seskoal.
- Singh, Bhuhindar dan See Seng Tan. 2011. *Defence Diplomacy in Southeast Asia, From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia*. Singapura: RSIS.
- Till, Geoffrey. 2004. *Sea Power: A Guide For the Twenty First Century*. Portland, London.
- Tim Pokja Kajian Pusjianstra TNI. 2012. *Doktrin Tridek TNI*. Jakarta: Pusjianstra TNI.

Tesis

- Multazam, Arifin. 2010. *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*. Depok: FISIP UI. (tesis).

Surat Kabar

- Juwana, Hikmawanto, "Australia Mengancam Kedaulatan Indonesia", *Suara Merdeka*, 9 Februari 2014.
- Madu, Ludiro, "Diplomasi Pertahanan RI", *Suara Merdeka*, 6 Maret 2014.

Website

- Diplomasi Pertahanan Indonesia-AS. 2014. Jakarta: Mabes TNI, dalam <http://www.tni.mil.id/view-2707-diplomasi-pertahanan-indonesia-as.html>, diunduh pada 8 juli 2014.
- Simatupang, Goldy, "Diplomasi Pertahanan ASEAN Dalam Rangka Stabilitas Kawasan", *Forum Pertahanan dan Kajian Maritim*, 22 Oktober 2013, dalam <http://www.fkpmaritim.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/>, diunduh pada 11 juli 2014.
- Wikipedia, "Diplomasi", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>, diunduh pada 10 Juli 2014.
- , "Diplomasi Pertahanan", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi_pertahanan, diunduh pada 10 Juli 2014.

Peraturan UU

- UU TNI, No 34 Tahun 2004, Pasal 9, Tahun 2004.

Lain-lain

- Orasi Ilmiah Kepala Staf TNI AL pada wisuda Sarjana Universitas Hang Tuah, 2014.